

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik di era abad 21 ini bukan lagi menjadi suatu hal etis untuk dibicarakan, dalam kesehariannya kegiatan politik sering dikaitkan erat dengan suatu organisasi masa yang disebut sebagai partai politik, hal ini karena partai politik pada dasarnya adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh para aktor politik untuk meraih jabatan politiknya.

Pada awalnya partai politik lahir pertama kali di negara eropa barat pada akhir abad 19 masehi. Kemunculan partai politik sendiri merupakan dampak luasnya gagasan bahwa keterlibatan rakyat merupakan salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dan diikuti sertakan dalam proses politik yang pada masa selanjutnya menjadikan partai politik sebagai penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.

Politik dalam suatu Negara pasti tidak lepas dari tujuan untuk mendapatkan kekuasaan (*power*), namun pda prinsipnya politik dalam suatu negara tidak boleh hanya ditekankan pada masalah kekuasaan (*power*) saja, tapi ia harus juga berkaitan dengan masalah-masalah terkait pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*Public policy*) dan alokasi atau distribusi (*Allocation or distribution*). Pemikiran mengenai partai politik di Indonesia sudah berkembang lebih dari satu abad lamanya, fenomena pergerakan partai politik masih sangat menarik untuk dibicarakan terutama bila itu berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan di tingkat nasional maupun daerah.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Negara Indonesia sendiri semenjak kemerdekaan Negara Indonesia sudah mengadakan pemilu sebanyak 11 kali, pemilu pertama pada tahun 1955, enam kali pada masa orde baru dan satu kali pada masa transisi pada tahun 1999 . dari masa transisi sampai sekarang Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) yakni pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang terakhir pada tahun 2014.

Kebangkitan Demokrasi Negara Indonesia bermula pada pemilihan Legislatif ( Pileg) Tahun 1999, ketika tahun tersebut merupakan momentum awal kebangkitan kebebasan berpolitik di negeri ini sekaligus menjadi titik tolak transisi menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik. Hasil Pemilu 1999 menunjukkan dari 48 Partai Politik peserta pemilu, tidak ada satupun Partai Politik peserta pemilu yang memperoleh suara mayoritas atau mutlak. Dan pada pemilu tahun 1999 hanya 6 parpol yang lolos electoral threshold.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tahun 2004, pada tahun tersebut masyarakat disajikan atau dihadapkan pada sistem pemilu “ Langsung “. Sistem Pemilu Legislatif yang menggunakan mekanisme proporsional dengan daftar “ Semi terbuka “ . ketika pelaksanaan pemilu tersebut masih menunjukkan kuatnya pengurus pusat partai dalam menentukan calon anggota legislatifnya. Namun setidaknya pemilu tahun 2004 sudah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menentukan calonnya. Hasil pemilu 2004 kemudian menunjukkan adanya perubahan peta politik baik di tingkat nasional maupun dalam tingkat lokal.

Melihat hasil pemilu pada tahun 2004, persaingan dan peta politik nasional berubah, banyak partai – partai politik baru yang muncul dan ikut serta dalam pemilihan umum pada tahun 2009, pada tahun 2009 ini parliamentary threshold di naikan menjadi 2,5 % tentu hal ini

akan menjadi tantangan tersendiri bagi partai-partai politik untuk memetakan peta politiknya dan menempatkan kader-kadernya untuk bertarung dalam pemilihan legislatif.

Selain itu Pada pemilu tahun 2009 diberlakukan adanya kuota 30% perempuan yang harus di lengkapi oleh parpol dalam mendaftarkan calon anggota legislatifnya. Dengan berbagai dinamika yang terjadi serta beberapa aturan yang dirubah, pada pemilu tahun 2009 memunculkan dominasi partai baru sebagai pemenang dalam pemilu tahun 2009. Banyaknya partai baru yang muncul tentu perolehan suara dari masing-masing partai tidak terlalu signifikan.

Keberhasilan sebuah partai dalam memperoleh suara tentu tidak lepas dari bagaimana kaderisasi dari sebuah partai tersebut, dan bagaimana partai tersebut mengelola partainya. Hal lain yang tidak kalah penting dalam hal memperoleh suara, yaitu bagaimana partai melaksanakan pola rekrutmen calon anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Semakin banyak para calon anggota legislatif yang terpilih, maka akan semakin banyak pula perolehan suaranya. Dalam rekrutmen calon anggota legislatif tentu setiap partai mempunyai pola yang berbeda dan strategi yang berbeda, dengan tujuan bagaimana memenangkan suara partai itu sendiri.

Strategi dari setiap partai pasti memiliki sistem pendekatan dan rekrutmen yang berbeda-beda, hal ini menarik apabila diteliti lebih dalam bagaimana cara rekrutmen partai politik untuk calon anggota legislatif, karena proses mengenai rekrutmen caleg tersebut hampir sebagian masyarakat tidak mengetahui proses tersebut, masyarakat hanya disajikan nama-nama yang muncul dan siap untuk dipilih.

Selain itu hal ini juga penting untuk diteliti karena ini juga menjadi tolak ukur apakah partai politik sudah melaksanakan kaderisasi dengan baik dan apakah sudah melaksanakan pendidikan politiknya dengan baik. Pola rekrutmen selama ini yang dilakukan oleh partai

politik di Indonesia masih menimbulkan berbagai masalah yang kemudian muncul ditengah dinamika yang terjadi. Fungsi rekrutmen oleh partai politik tersebut melahirkan persoalan kaderisasi partai politik yang belum mempunyai pola atau susunan yang sistematis dan terstruktur.

Setiap partai politik memiliki pola sendiri-sendiri yang tidak terhubung satu sama lain dalam suatu sistem ketatanegaraan dan sistem hukum. Sehingga terlihat pola rekrutmen oleh partai politik berada di area yang bebas. Padahal pola rekrutmen tersebut pada akhirnya berdampak pada aspek ketatanegaraan yang lebih luas.

Dampak atau akibat dari pola rekrutmen politik yang tidak tersistematis Indonesia terancam kekurangan negarawan yang merupakan salah satu akibat dari tidak berjalannya fungsi rekrutmen oleh partai politik karena sikap pragmatism partai politik, kaderisasi partai politik hanya sebatas teori. Sikap pragmatism partai politik tersebut hanya bertujuan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya saat Pemilu. Untuk itu dalam rangka meraup suara tersebut, partai politik lebih memilih calon yang bermodal kuat dan telah mendapat dukungan atau sudah dikenal oleh masyarakat dan sebagainya . (Kompas, 2017)

Dalam penelitian kasus ini peneliti mengambil salah satu partai yang terbilang cukup baru dalam kancah perpolitikan di Negara Indonesia yaitu partai Hanura (Hati Nurani rakyat). Partai Hanura merupakan partai yang didirikan oleh Jendral. Purn .Wiranto pada tanggal 14 november 2006 yang didirikan bersama para tokoh nasional yang memiliki satu pandangan dan tujuan yang sama. Partai Hanura mempunyai Visi “ Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmmur” Dalam perkembangannya Partai Hanura sudah mengikuti dua kali proses pemilu yaitu tahun 2009 dan tahun 2014. Pada tahun 2009 partai Hanura memperoleh suara 3.922.870 atau (3,77 %),

Tabel 1.0 Data Perolehan Pemilu Tahun 2009

| No  | Partai Politik (No Pemilu) | Jumlah Suara | Persentase |
|---|----------------------------|--------------|------------|
|    | Demokrat (31)              | 21.703.137   | 20,85%     |
|    | Golkar (23)                | 15.037.757   | 14,45%     |
|    | PDIP (28)                  | 14.600.091   | 14,03%     |
|    | PKS (8)                    | 8.206.955    | 7,88%      |
|    | PAN (9)                    | 6.254.580    | 6,01%      |
|    | PPP (24)                   | 5.533.214    | 5,32%      |
|    | PKB (13)                   | 5.146.122    | 4,94%      |
|   | Gerindra (5)               | 4.646.406    | 4,46%      |
|  | Hanura (1)                 | 3.922.870    | 3,77%      |

Sumber : (KPU,2009)

Sedangkan pada pemilu tahun 2014 Hanura memperoleh 6.579.498 (5,26 %) hal ini menunjukkan suatu trend positif dari partai Hanura secara nasional. (KPU, 2014)

Gambar 1.0 Data Perolehan Suara pemilu Tahun 2014



Sumber : (KPU, 2014)

Partai ini merupakan sebuah partai baru dalam perpolitikan Nasional, Berbicara mengenai Partai Hanura ( Hati Nurani Rakyat) di tingkat Daerah tentu berbeda dengan kondisi Partai Hanura di tingkat Nasional. Partai Hanura di tingkat daerah khususnya Pacitan bisa berkembang dengan baik selama 3 periode pemilu yang berjalan ini, hal ini dikarenakan proses pengkaderan dan penyusunan rencana program partai yang berjalan dengan baik.

Bahkan apabila melihat pemilu terakhir Partai Hanura Secara Nasional tidak memenuhi ambang batas parlemen dengan begitu Partai Hanura tidak lolos parlemen. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan di Kabupaten Pacitan, di Pacitan sendiri di pemilu terakhir Partai Hanura tetap mendapat tiga kursi, akan tetapi jumlah suara per periode selalu meningkat. Hal ini membuktikan bahwa kondisi Politik/ Partai secara Nasional, belum tentu sama dengan kondisi Politik/ Partai di tingkat daerah.

Maka dari itu Partai Hanura Kabupaten Pacitan melakukan penguatan serta membentuk kader-kader yang sangat militan untuk bisa memperjuangkan Partai. Pada awal mula Partai Hanura masuk dan terbentuk di Kabupaten Pacitan banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detail mengenai partai Hanura itu sendiri, dengan dukungan dari pengurus pusat dan provinsi pada akhirnya partai Hanura mulai membentuk pengurus dan Kader di wilayah Kabupaten Pacitan. Tentu perjuangan ini tidak mudah karena Kabupaten Pacitan terkenal akan Partai Demokrat karena Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan putra Pacitan.

Namun seiring berjalannya waktu dan proses kaderisasi yang baik, pada pemilu tahun 2009 partai Hanura Kabupaten Pacitan memperoleh suara 14.465 suara dan dapat menempatkan 2 wakil yang duduk di kursi legislatif.(Data KPU Kab. Pacitan 2009). Tentu ini merupakan sebuah modal awal yang sangat bagus bagi partai baru dan muncul di Kabupaten

Pacitan yang terkenal merupakan Rumah Bagi Partai Demokrat. Tentu ini tidak terlepas dari Bagaimana proses kaderisasi dan sistem rekrutmen calon anggota legislatif nya.

Pada pemilu tahun 2014 Partai Hanura Kabupaten Pacitan mengalami sedikit kendala, pada pemilu legislatif tahun 2014 Partai Hanura menargetkan 4 kursi dari yang semula pada tahun 2009 memperoleh 2 kursi, namun pada kenyataannya pada pemilu tahun 2014 Hanura hanya memperoleh 3 kursi DPR Kabupaten. Tentu target ini bukan sesuatu yang sulit apabila proses kaderisasi dan rekrutmen calon anggota legislatif dilaksanakan dengan baik. Tentu tidak tercapainya target ini menandakan adanya permasalahan baik dari rekrutmen sampai strategi pemenangannya.

Kondisi ini perlu diteliti lebih dalam bagaimana peran partai dalam proses kaderisasi hingga rekrutmen caleg dan menentukan strategi pemenangan nya agar kita mengetahui bagaimana dinamika dalam sebuah partai tersebut. Tentu hal ini menjadi warning / peringatan terhadap partai Hanura untuk mengevaluasi apakah selama ini pola rekrutmen kader, rekrutmen caleg, dan strategi pemenangan nya masih ada yang salah sehingga target ini tidak terpenuhi.

Melihat dinamika dan belajar dari pemilu tahun 2014, Partai Hanura sendiri melihat pemilu 2019 dengan penuh optimisme, sesuai dengan Rapimnas partai Hanura di Bali pada bulan Agustus 2017 lalu, target Partai Hanura pada pemilu tahun 2019 menjadi partai yang masuk 3 besar atau 5 besar secara Nasional. Target ini merupakan target yang sangat berat, tetapi dengan segala optimisme partai Hanura yakin bisa mencapai target tersebut. Melihat target tersebut, partai Hanura Kabupaten Pacitan menyikapinya dengan optimis, hal ini bisa dilihat dari koordinasi Partai hingga tingkat dusun, hal ini untuk memperkuat jaringan partai.

Selain itu partai Hanura juga melakukan rekrutmen caleg disertai pemetaan wilayah dan pemetaan suara, dengan harapan target 1 fraksi (6 anggota DPR) Hanura Kabupaten

Pacitan 2019-2024 bisa terpenuhi. Dalam mencapai target tersebut banyak pola strategi yang disiapkan salah satunya bagaimana memunculkan calon anggota legislatif muda (milineal) dan memunculkan dari perwakilan perempuan. Hal ini dibuktikan dari presentase caleg yang berumur dibawah 40 tahun ada di sekitar 70% dan presentase keterwakilan perempuan Partai Hanura melebihi batas yang di tetapkan KPU, Hal ini guna untuk mencapai target 6 kursi (1 fraksi).

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Hanura Kabupaten Pacitan Dalam Pemilu Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **C.1. Secara Umum**

- a) penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui mengenai bagaimana Pola rekrutmen Partai Hanura di Kabupaten Pacitan untuk Calon Anggota Legislatif Pada pemilihan umum tahun 2019.

### **C.2. Secara Khusus**

- a) penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi kepada partai Hanura sebagai bahan evaluasi untuk bisa memperbaiki pola rekrutmen caleg di pemilu yang akan datang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **D.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran mengenai rekrutmen politik calon anggota legislatif.
- b) Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran mengenai rekrutmen politik calon anggota legislatif.
- c) Sebagai Pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem rekrutmen calon anggota Legislatif .

### **D.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang proses rekrutmen Calon anggota legislatif dalam menghadapi pemilihan umum.

- b) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah wawasan dan referensi mengenai proses rekrutmen calon anggota legislatif dalam menghadapi pemilihan umum.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan

telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang tersedia. (prastowo, 2012). Dalam penelitian ini ada beberapa jurnal buku serta data, diantaranya :

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

| No | Judul  | Penulis                   | Tahun | Isi  |
|----|--|---------------------------|-------|--|
| 1  | Pola Rekrutmen politik berdasarkan ideologi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia | Else Suuhaimi             | 2018  | Dalam penelitian ini, proses rekrutmen politik didasarkan pada ideologi partai, jadi dalam pengambilan keputusan juga dikembalikan lagi kepada ideologi partai tersebut. Rekrutmen berdasarkan ideologi lebih mudah untuk dievaluasi karena akan dilaksanakan secara terus menerus |
| 2  | Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD dalam Penyelenggaraan pemilu Tahun 2014               | Tatang Sudrajat           | 2016  | Dalam penelitian ini lebih menyoroti mengenai penerapan undang-undang KPU yang membahas mengenai syarat-syarat untuk pencalonan anggota DPR, selain itu pembahasan alur waktu dari mulai pendaftaran sampai dengan penetapan.  |
| 3  | Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (studi kasus PDI Tulungagung)      | Laily Purnawati           | 2014  | Dalam penelitian ini peneliti memberikan kesimpulan bahwa proses rekrutmen Politik Partai PDIP Tulungagung menggunakan 2 sistem sekaligus yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka .   |
| 4  | Model rekrutmen Calon Anggota legislatif oleh Partai Golkar Kabupaten Sidoharjo.                 | Hendra Sukmana<br>Arsiyah | 2013  | Dalam penelitian ini proses rekrutmen calon anggota legislatif berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh partai  |
| 5  | Peran Komunikasi Politik dalam Proses rekrutmen Kader Perempuan Partai Politik di Aceh           | Erly Hasim                | 2018  | Dalam penelitian ini proses rekrutmen politik masih lemah, karena partai politik hanya merekrut kader perempuan hanya sebatas  |

|    |  |  |      |   |
|----|--|--|------|---|
|    |  |  |      | untuk memenuhi kuota perempuan, bukan mencari kader perempuan yang berkualitas.   |
| 6  | Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru Tahun 2014  | Rhanty Shefira Salsabila                             | 2016 | Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa partai Gerindra menggunakan sistem rekrutmen Politik menggunakan dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup.  |
| 7  | Faktor-faktor Pemenangan Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PKB dan PDI-Perjuangan pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan                         | Wahyu Kurniawan                                      | 2015 | Dalam penelitian ini partai PKB dan PDIP tidak hanya mengandalkan calon anggota legislatif yang sudah di seleksi secara internal tetapi juga memberikan peluang pada caleg lain diluar partai untuk ikut dalam proses seleksi     |
| 8  | Rekrutmen Politik Partai Demokrat dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Manado tahun 2014  | Intan Dwigustiani<br>Michael Mamentu<br>Alfon Kimbal | 2014 | Dalam penelitian ini partai demokrat menggunakan sistem terbuka dan memberikan kesempatan pada seluruh kader untuk mengikuti proses rekrutmen ini. Proses rekrutmen ini partai demokrat juga mengacu pada JUKLAK partai demokrat. |
| 9  | Political family and Intra-Party Democracy in Indonesia ( A study on The political Recruitmen of the Golkar party during The reform era in south sulawesi) | Titin Purwaningsih<br>Valina Singka Subekti          | 2017 | Dalam penelitian ini rekrutmen politik partai Golkar berdasarkan prestasi, elektabilitas dan kesetiaan kepada partai politik. Tipe perekrutan politik partai golkar adalah meritokratis   |
| 10 | Female Representation In Parlemtent (A Case Study From Bangladesh)   | Nomita Halder  | 2004 | Dalam penelitian ini peran perempuan sangat minim sekali, hal ini karena ada beberapa faktor penghambat, salah satunya kebijakan pemerintah sehingga keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 2%                         |

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah di tulis di atas, ada persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang rekrutmen calon anggota legislatif. Sedangkan ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini kajian mengenai sistem rekrutmen diawali dari sistem rekrutmen kaderisasi, sistem rekrutmen kaderisasi merupakan tahap awal untuk kemudian dilanjutkan sebagai bahan untuk melaksanakan proses rekrutmen calon anggota legislatif. Dalam penelitian ini tidak hanya membahas rekrutmen laki-laki/perempuan, tetapi keduanya akan dibahas, sampai dengan strategi pemenangan nya.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **F.1. Rekrutmen Politik**

Partai politik yang ada di Indonesia saat ini memiliki beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota / kader untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga maupun organisasi pemerintahan lain nya.

Dalam studi tentang rekrutmen politik, istilah rekrutmen politik sering dipertukarkan dalam makna yang sama dengan seleksi kandidat, rekrutmen legislatif dan eksekutif tetapi aada yang berusaha menarik garis batas antara istilah-istilah tersebut sebagai konsep yang berbeda dan ada pula yang menyatakan bahwa istilah-istilah tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Bagi yang membedakan, rekrutmen politik didefinisikan sebagai bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, sedangkan seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial. Sementara rekrutmen legislatif berbicara tentang bagaimana kandidat yang didominasi partai terpilih menjadi

pejabat publik. Ada beberapa teori ahli yang mungkin menjelaskan mengenai rekrutmen politik diantaranya :

Dari beberapa teori yang akan dijelaskan, ada beberapa teori yang hampir sama sistemnya yaitu teori Menurut Almond dan Powell (Gabriel Almond, 1996) dan Rush Althof (Michael Rush P. A., 2007), mereka beranggapan bahwa Proses rekrutmen politik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu rekrutmen secara terbuka dan rekrutmen secara tertutup.

a. Rekrutmen Terbuka : merupakan mekanisme rekrutmen secara terbuka untuk semua warga masyarakat.

b. Rekrutmen Tertutup : merupakan mekanisme rekrutmen yang dilakukan kepada orang-orang tertentu, orang-orang dari agama, wilayah, suku atau dengan keluarga yang sama.

Teori ini sangat banyak digunakan di dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif di setiap partai, akan tetapi proses ini hampir mayoritas di gunakan hanya pada rekrutmen tertutup saja, jadi proses rekrutmen tersebut seakan-akan tidak transparan dan masyarakat hanya tau ketika sudah penetapan calon terpilih.

Dari kedua teori diatas, munculah satu teori yang memperkuat sistem rekrutmen tersebut, teori ini muncul dari seorang ahli yaitu Affan Gafar (Gafar, 2005) Menurut Affan Gafar Rekrutmen politik dilaksanakan secara terbuka. Artinya, setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk menduduki suatu jabatan politik. Sebaliknya, dinegara yang tidak demokratis rekrutmen politik biasanya bersifat tertutup. Peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja.

Inti dari kedua model ini adalah apabila partai politik menggunakan sistem rekrutmen terbuka maka partai politik memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara

untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dan apabila partai rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik.

Pendapat lain juga datang dari ahli yaitu Geddes barbara (Geddes, 1997), Geddes membedakan rekrutmen politik menjadi 4 (empat) model :

a. Model Keberpihakan

Model perekrutan ini didasarkan atas kesetiaan Kader terhadap partai tanpa memperhatikan kompetensi.

b. Meritokratis

Model perekrutan ini didasarkan pada kompetensi, seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja terampil.

c. Model Kompartementalisasi

Model perekrutan ini didasarkan pada pragmatisme, dan lebih mencampuradukan antara model meritokrasi dan model keberpihakan.

d. Model Kelangsungan Hidup

Model perekrutan ini didasarkan pada prinsip-prinsip pengkajian sumber daya, model ini cenderung ke patronase calon.

Model Geddes ini apabila di terapkan di indonesia yang hampir semua partai lakukan yaitu model meritokratis, model ini didasarkan pada kompetensi, materi dan pengetahuan, hampir mayoritas partai dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif nya menyasar kepada pengusaha, hal ini disebabkan karena mereka beranggapan bahwa pengusaha itu nanti

bisa mendongkrak partai dan kemungkinan bisa memenangkan pemilu karena didasarkan pada materi yang sangat banyak.

Selain itu Rush dan Althof juga menjelaskan mengenai tahapan dan mekanisme dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif. Dalam (Michael Rush P. A., 2007) menjelaskan mengenai tahapan tersebut yaitu :

### 1. Penyediaan Caleg

Penyediaan rekrutmen caleg merupakan tahap awal yang dilakukan oleh partai untuk mendapatkan gambaran mengenai calon anggota legislatif nya untuk melalui tahap seleksi awal, dalam tahap ini ada 3 mekanisme perekrutan caleg melalui : a) Mekanisme rekrutmen caleg yang dilakukan partai. b ) Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen caleg. c ) sarana rekrutmen caleg.

### 2. Kriteria Rekrutmen Caleg

Kriteria / syarat rekrutmen caleg merupakan sesuatu indikator yang penting untuk menyeleksi calon anggota legislatif dan untuk menentukan layak atau tidak nya seseorang itu menjadi calon anggota legislatif. Kriteria/ syarat calon anggota legislatif harus di tentukan agar proses rekrutmen politik ini bisa menghasilkan seseorang yang memang pantas untuk menjadi calon anggota legistalif nantinya, menurut (Richard s Katz, 2006)ada beberapa kriteria yaitu :

#### 1. Usia

Usia merupakan kriteria pertama dimana seseorang haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapa menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah.

## 2. Popularitas

Yakni seseorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan mempunyai reputasi yang baik.

## 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kriteria penting dimana seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

## 4. Keuangan

Hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seseorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.

## 5. Akseptabilitas

Yakni penerimaan masyarakat terhadap seseorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar dapat menyuarakan kepentingannya.

## 3. Kontrol Rekrutmen Caleg

Kontrol rekrutmen caleg merupakan peran yang dilakukan oleh partai untuk mengontrol proses jalannya rekrutmen calon anggota legislatif. Peran kontrol ini sangat penting untuk partai mengetahui sejauh mana proses rekrutmen ini berjalan. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada : a) bakal calon anggota legislatif dari internal partai. b) bakal calon anggota legislatif dari external partai.

## **F.2. Partai Politik**

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Partai politik pertama kali lahir di negara-negara eropa barat.

Seiring berjalan nya waktu dan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuk nya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara pendukungnya menjelang masa pemilihan umum ( *caucus party*). Maka pada akhir abad ke-19 loahirlah partai politik yang menjadi penghubung antara masyarakat di satu pihak dengan pemerintah di pihak lain.

Partai semacam ini daalam praktiknya hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilihan umum, sedangkan pada masa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan otrang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa di konsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam permbuatan dan pelaksanaan keputusan. Ada bebrapa teori mengenai partai politik dari bebrapa ahli :

Menurut Carl J. Frederich (Carl J, 1967) Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil dan materiil.

Pendapat lain juga dikemukakan Sigmund Neuman (Neuman, 1963) Dalam karanganya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi partai politik sebagai “Partai

politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dalam hal ini partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi

Beberapa pendapat ahli diatas memang sesuai dengan kondisi partai politik di indonesia pada masa kini, hampir dari semua partai politik berusaha menghalalkan segala cara untuk bisa mempertahankan eksistensi nya dan bisa bertahan dalam menguasai pemerintahan, efek dari hal tersebut pada masa kini banyak oknum-oknum partai politik yang terjerat kasus, hal ini dikarenakan parai elite partai tidak mengetahui apa yang menjadi tujuannya, dan hanya berusaha mempertahankan kekuasaan nya saja.

Sedangkan menurut Giovanni Sartori Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum, mampu menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan publik. (Sartori, 1967)

Dan pendapat ahli terakhir muncul dari Miriam Budiardjo (Budiharjo, 2009) menurut Pengertian partai politik sebagai sekumpulan atau sekelompok orang yang diorganisir dimana ada kesamaan orientasi, nilai dan cita-cita pada para anggotanya. Mereka mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kekuasaan politik.

Partai politik adalah organisasi modern yang mempunyai manajemen pengelolaan yang terstruktur guna memaksimalkan fungsinya, secara umum hal yang membedakan antara partai politik dengan organisasi lainnya seperti kelompok kepentingan (interest grup) dan kelompok penekan (pressure grup). Selain itu partai politik dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon nya untuk jabatan

publik, sedangkan kelompok kepentingan dan penekan lebih memilih cara persuasi atau propaganda dalam usaha mempengaruhi pemerintah.

### **F.3 Fungsi – Fungsi Partai Politik**

#### **1. Partai Politik sebagai sarana Komunikasi Politik**

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, pada suatu negara, sistem politik yang sehat harus didukung oleh komunikasi politik yang dijalankan dan digiatkan oleh partai-partai politik, partai politik merupakan pihak yang bertanggung jawab atas berjalannya komunikasi politik.

Menurut Sigmund Neuman, dalam hubungan dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga resmi pemerintah dan mengaitkan dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. (Neuman, 1963)

#### **2. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi dan Konsolidasi Politik**

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang misalnya nasionalisme, kelas, sosial, suku bangsa, ideologi dan hak kewajiban.

Disisi lain dari fungsi sosialisai partai politik adalah upaya partai politik untuk menciptakan citra (image) bahwa memperjuangkan kepentingan umum adalah bagian dari misi partai politik. Dari proses sosialisasi politik ini sedikit banya akan mempengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat.

#### **3. Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik**

Dalam partai politik, proses rekrutmen politik merupakan bagian terpenting dalam proses menjalankan fungsi kepartaian, karena melalui kegiatan rekrutmen ini partai politik dapat menjaga kelangsungan dari sistem pengkaderannya dan menjalankan fungsinya sebagai partai politik secara nyata. Fungsi rekrutmen ini merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh partai politik.

Akan tetapi partai politik dalam menjalankan fungsinya ini terlihat seperti tertutup, hampir semua partai politik melakukan rekrutmen secara tertutup dan rahasia dan rata-rata masyarakat tidak mengetahuinya dan biasanya memunculkan dinamika baru dalam fenomena politik.

#### 4. Partai Politik sebagai sarana Pengatur Konflik

Perbedaan antara kehendak dan realitas yang terjadi mengakibatkan sebuah gesekan antar bagian yang berujung pada perselisihan hingga mengakibatkan sebuah konflik atau pertentangan. Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disinilah peran partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisatoris antara warga negara dengan pemerintah ataupun kelompok lain.

Selain itu partai politik sangat dibutuhkan perannya untuk membantu mengatasi gesekan yang diakibatkan realitas politik. Atau sekurang-kurangnya dapat diatasi sedemikian mungkin terutama konflik yang melibatkan massa dengan jumlah yang sangat banyak.

#### **F.4 Tipologi Partai Politik**

Di negara Indonesia ini ada berbagai tipe partai politik yang berbeda-beda, tentu kita sebagai masyarakat harus bisa membedakan antara partai satu dengan partai lainnya. Berangkat dari kompleksitas tersebut, Krouwel dalam (Pamungkas, 2003) mengusulkan metode paling sederhana dan jelas dalam membedakan partai politik berdasarkan

karakteristiknya. Berdasarkan kemiripan dan ciri-ciri khusus, Krouwel teah mengelompokan beragam tipe partai politik kedalam lima jenis dasar, yaitu :

### **1. Partai Kader**

Partai kader merupakan sebuah partai yang pada umumnya berstruktur longgar, sangat elit sentris dan dipimpin oleh individu yang teremuka atau bisa dikatakan partai yang memiliki sosok utama yang sangat kuat. Asal usul partai ini berasal dari dalam parlemen, yaitu sebagai bagian dari elit yang berkuasa di dalam dalam struktur parlemen yang berusaha mempertahankan eksistensinya di panggung politik .

Dari dimensi ideologi partai ini menekankan pada usaha untuk melakukan perluasan kompetisi partai dan mengandalkan pada pesona basis status personal dan kemakmuran individu-individu partai.

### **2. Partai Masa**

Menurut Wolinetz, salah satu ciri terpenting dalam partai masa adalah partai ini senantiasa berorientasi pada kebijakan (policy-seeking). Asal usul dari partai ini adalah lahir diluar parlemen, kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat berusaha me pengaruhi arah politik Negara.

Kelompok – kelompok sosial ini mengartikan kepentingan-kepentingan politik nya sendiri, perdebatan untuk mengambil posisi kebijakan yang intensif, fokus dan hampir melibatkan semua level partai. Akibatnya konsistensi asumsi posisi kebijakan dengan ideologi partai sangat tinggi.

### **3. Partai Catch – All**

Partai Catch-All berasal dari partai masa yang memprofesionalisasi organisasi kepartainnya dan melakukan penyeuaian ideologi dengan tujuan bisa merangkul pemilih yang

lebih luas dari basis luar kelas maupun agama mereka berasal maupun kelompok – kelompok sosial di luar lingkarannya.

Basis kompetensi partai ini adalah kualitas manajemen sektor publik mengupayakan sejauh mana persoalan publik dapat dikelola sedemikian rupa sesuai dengan kehendak mayoritas pemilih, dan perluasan kompetensi partai dilakukan dengan kompetensi bersifat sentripental dalam teknikalitas.

#### **4. Partai Kartel**

Partai kartel merupakan sebuah partai yang memiliki ciri peleburan partai pada jabatan publik dengan beberapa kelompok kepentingan yang membentuk kartel politik, dengan tujuan utama mempertahankan kekuasaan yang ada di eksekutif. Kompetisi dalam partai ini berkompetisi dengan cara merawat kekuasaan yang tumbuh dari pembagian jabatan eksekutif. Orientasi atau tujuan dari partai ini adalah bagaimana mencari kekuasaan dan jabatan. Sehingga apabila mempunyai kekuatan maka akan mempengaruhi segala kebijakan.

#### **5. Partai Firma Bisnis**

Tipe partai politik ini muncul atas inisiatif pribadi para entrepreneur politik dan sebagian besar memiliki struktur perusahaan komersil. Partai firma bisnis ini merupakan kategori baru dalam studi kepartaian, partai tipe ini menempatkan pemilih, pengurus, ideologi dan organisasi partai bukan sebagai sesuatu yang penting dalam menggerakkan partai. Eksistensi partai terutama berporos pada kemampuan dari wirausahawan politik untuk membangun pencitraan serta memanfaatkan teknik-teknik baru dalam kampanye pemilu untuk memperoleh kemenangan.

## **F.5 Sistem kepartaian**

Sistem kepartaian merupakan sebuah sistem yang mengatur mengenai jumlah partai yang berhak mengikuti pemilihan umum yang ada di sebuah negara. Ada beberapa ahli yang menyampaikan teori mengenai sistem kepartaian ini, yaitu yang pertama kali yang membahas siste kepartaian adalah (Maurice, 1954) dalam bukunya yang berjudul “ *Political Parties*”. Duverger mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 3 klasifikas yaitu :

### **1. Sistem Partau Tunggal**

Sistem partai tunggal, istilah ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain. Contoh beberapa pola partai tunggal yang di terapkan di berbagai negara antara lain : Afrika, China, dan Kuba. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena suatu partai harus menerima pimpinan partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.

Di Indonesia pada tahun 1945 ada usaha untuk mendirikan partai tunggal sesuai dengan pemikiran yang pada saat itu banyak dianut di negara-negara yang baru melepaskan diri dari rezim kolonial. Diharapkan parati itu akan menjadi motor perjuangan. Akan tetapi setelah bebrapa bulan, usaha mendirikan partai tunggal ini dihentikan.

### **2. Sistem Dwi-Partai**

Berdasarkan kajian ilmu politik, sistem dwi-partai merupakan ada dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan yang dominan. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa . denggan demikian jelaslah dimana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum.

Sistem dwi-partai pernah disebut *a convenient system for contented people* dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen (social homogeneity), adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik (political consensus), dan adanya kontinuitas sejarah (historical continuity). (Peter G, 1967)

Sistem dwi-partai pada umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single-member constituency (sistem distrik) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat di[i]lih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini cenderung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga demikian memperkuat sistem dwi-partai

### **3. Sistem Multi Partai**

Sistem multi partai merupakan sistem kepartaian yang memiliki keanekaragaman budaya politik di suatu masyarakat. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primordial) dalam suatu wadah yang sempit saja. Pola multi partai dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai. (Maurice, 1954)

Sistem multi partai, jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

### **F.6. Calon Anggota Legislatif**

Calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk mengukur calon anggota legislatif dapat dilihat dari apakah sudah

menjalani proses rekrutmen Caleg. Rekrutmen diartikan sebagai seleksi seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh Partai.

Ada beberapa hal menurut (Czudnowski, 1975) yang dapat menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif, sebagaimana berikut :

a. Social Background

faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seorang calon elit dibesarkan

b. Political Socialization

merupakan suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.

c. Initial Political Activity

faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.

d. Apprenticeship

faktor ini menunjuk langsung pada proses “magang” dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.

e. Occupational Variables

calon dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya.

f. Motivations

orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.

## **F.7. Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang dasar negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu yang bertujuan melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai bentuk perwujudan hak asasi politik rakyat yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tercapainya penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Pemilu yang istilah lainnya sebagai ajang pesta demokrasi dimana dalam momentum ini rakyat akan memberikan wewenangnya kepada para calon peserta pemilu untuk mewakili segala bentuk keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik itu skala lokal maupun nasional.

Dalam pemilihan umum di Indonesia, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ada tiga rangkaian pemilihan umum yaitu :

### **1. Pemilihan Presiden dan Wakil presiden**

Pemilihan presiden dan wakil ppresiden yaitu pemilihan untuk menentukan siapa yang menjadi kepala negara.

### **2. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan yang bertujuan untuk memilih Gubernur (tingkat Provinsi) , walikota (tingkat kota) dan Bupati (di tingkat kabupaten).

### 3. pemilu Parlemen (DPR, DPD, DPRD)

Pemilihan untuk memilih perwakilan legislatif untuk ditingkat pusat dan daerah serta memilih DPD sebagai dewan perwakilan daerah.

## **F.8 Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)**

Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih / mencoblos wakil masyarakatnya sendiri. Menurut Miriam Budiarjo (Budiharjo, 2009) sistem pemilihan umum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

### 1. Sistem Distrik ( *Single-member Constituency* )

Didalam sistem distrik sebuah daerah kecil menentukan suatu wakil tunggal berdasarkan suara terbanyak. Sistem distrik bisa dimaknai bahwa satu dapil memilih satu wakil. Sistem ini memiliki karakteristik, antara lain :

a. *First past the post* : sistem yang menerapkan single member district dan pemilihan berpusat pada calon, pemenangnya adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.

b. *The two round system* : sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai dasar untuk menentukan pemenang pemilu. Ini dijalankan untuk memperoleh pemenang yang mendapatkan suara mayoritas.

c. *The alternative vote* : sama dengan first past the post bedanya adalah para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan preferensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.

d. *Block vote* : para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon anggota yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon yang ada.

Kelebihan sistem Distrik

- a. Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kekuasaan yang diperoleh hanya satu.
- b. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami.
- c. Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.
- d. Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.
- e. Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan.

#### Kelemahan Sistem Distrik

- a. Ada kesenjangan presentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa.
- b. Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang.
- c. Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis.

#### **2. Sistem Proporsional ( *Multy – member Constituency* )**

Sistem proporsional merupakan sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Sistem proporsional dapat dimaknai bahwa satu dapil memilih beberapa wakil. Sistem ini juga dinamakan perwakilan berimbang ataupun multi member constituency. Ada dua jenis sistem di dalam sistem proporsional yaitu :

- a. Sistem Proporsional Tertutup ( *list proportional representation* )

sistem ini mengharuskan partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.

b. Sistem Proporsional Terbuka ( *the single transferable vote* )

para pemilih diberi otoritas untuk menentukan pilihannya, pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota yang sudah diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

#### Kelebihan Sistem Proporsional

- a. Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan presentase kursinya di parlemen.
- b. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat.

#### Kelemahan Sistem Proporsional

- a. Sistem proporsional tidak begitu mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus berubah dan bertambah menghalangi integrasi partai.
- b. Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
- c. Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas.

Perbedaan utama antara sistem proporsional dan distrik adalah bahwa cara penghitungan suara dapat memunculkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik merupakan sebuah rangkaian yang ada dalam setiap Partai Politik terhadap seseorang maupun kelompok untuk melakukan sejumlah peranan dalam sistem politik dan juga pemerintahan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh partai atau elite politik tersebut

### **2. Partai Politik**

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan bagaimana bisa memberikan pendidikan politik pada masyarakat dan memiliki tujuan yaitu bagaimana bisa meraih kekuasaan baik yang ada di pemerintahan atau lembaga lainnya.

### **3. Calon Anggota Legislatif**

Calon Anggota Legislatif (caaleg) merupakan seseorang yang di rekrut oleh partai yang kemudian di calonkan menjadi calon anggota legislatif yang dipilih melalui proses pemilihan umum.

## **H. Definisi Operasional**

### **1. Rekrutmen Politik**

Dalam Rekrutmen politik calon anggota legislatif Partai Hanura Kab. Pacitan, peneliti dalam hal ini menggunakan teori sistem rekrutmen Rush (Michael Rush P. A., 1997) dan Althof rekrutmen politik dibagi menjadi dua,

- a. Pertama rekrutmen terbuka

b. Kedua rekrutmen tertutup

Dari penjelasan teori di atas ada beberapa tahapan dan indikator yang menjadi acuan nantinya untuk penelitian, maka dalam penelitian ini juga menggunakan indikator dari Rush dan Althof (Michael Rush P. A., 2007) serta menggunakan teori Kriteria Rekrutmen politik menurut Katz dan Wiliam Croy . Ada beberapa tahapan dan Indikator yaitu :

1. Tahap Penyediaan Rekrutmen Politik terhadap Caleg

- a. Mekanisme rekrutmen Caleg yang dilakukan Partai
- b. Waktu dan Tempat pelaksanaan rekrutmen Caleg
- c. Sarana rekrutmen Caleg

2. Kriteria Rekrutmen politik/ Kriteria Caleg

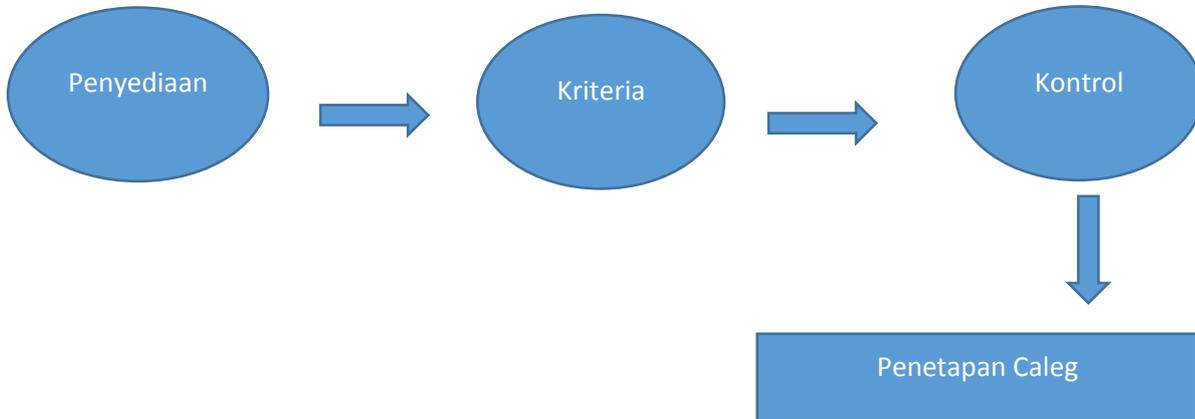
- a. Usia
- b. Popularitas
- c. Pendidikan
- d. Keuangan
- e. Akseptabilitias

3. Kontrol Rekrutmen politik Caleg

- a. Bakal calon anggota legislatif internal partai.
- b. Bakal calon anggota legislatif dari eksternal partai

**Gambar : 1.1 Model Rekrutmen Politik Rush dan Althoff**

**Apabila di Susun dengan Bagan Ada 3 Tahap :**



## **I. Metode penelitian**

### **I.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif, dimana pada penelitian ini langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara serta pengumpulan data, dengan begitu jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif.

### **I.2. Jenis Data**

#### a) Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari hasil observasi dengan cara wawancara langsung kepada jajaran pengurus Partai Hanura dan beberapa calon anggota legislatif yang ada di dalam Partai Hanura Kabupaten Pacitan.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang di peroleh baik dalam bentuk data yang diminta secara langsung guna untuk membantu memperkuat atau mendukung data Primer, data yang di peroleh dari KPU kabupaten Pacitan dan Partai Hanura Kabupaten Pacitan.

### **I.3. Obyek dan Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah KPU dan Partai Hanura Kabupaten Pacitan. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Jajaran pengurus Partai Hanura Kabupaten Pacitan, Perwakilan KPU dan beberapa Calon Anggota Legislatif.

### **I.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a) Teknik Wawancara ( interview)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Esterberg, 1985) Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Jajaran Pengurus Partai Hanura Kabupatn Pacitan, Perwakilan KPU, dan beberapa Calon Anggota Legislatif Partai Hanura Kabupaten Pacitan.

b) Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatn peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, data , gambar. Dalam penelitian ini kami juga meminta data baik kepada Partai maupun pada KPU sebagai pendukung. (Purnawati, 2014)

## **I.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta data pendukung yang di peroleh di lapangan. Dalam penelitian mengenai pola rekrutmen caleg ini kami menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (huberman, 1984), kedua nya mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan bisa berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga bisa sampai tuntas. Ada beberapa komponen dalam analisis data :

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya.

### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam Miles dan Huberman (1984) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### **3. Verifikasi atau Penyimpulan data**

Dalam penelitian ini verifikasi atau penyimpulan data adalah, menyimpulkan uraian-uraian yang sudah di paparkan kemudian di perkuat dengan data-data pendukung yang diperoleh ketika melakukan observasi.

